BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

RENCANA KERJA

BKD PROV. NTB

Tahun 2025

NTB MAJU MELAJU

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI ..... **i**
DAFTAR TABEL ..... **ii**
DAFTAR GAMBAR ..... **iii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum 4
1.3 Maksud dan Tujuan 6
1.4 Sistematika Penulisan 7

BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU **8**
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja s.d Bulan September dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 13
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 15
2.4 Riview terhadap Rancangan Awal RKPD 16

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH **34**
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 34
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 36
3.3 Program dan Kegiatan 38

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN **48**

BAB V PENUTUP **67**

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Capaian Renstra BKD Provinsi NTB s.d Triwulan III Tahun 2024 8

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Sistem Merit Prov. NTB 14

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja IPA Prov. NTB s.d bulan September 15

Tabel 2.4 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB (berdasarkan permendagri 90/2019) 18

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB Tahun 2019-2023..... 37

Tabel 3.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran BKD Provinsi NTB dengan Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 38

Tabel 3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2025 BKD Prov. NTB 39

Tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 50

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan Renja-OPD 3

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 19 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi NTB Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi NTB Tahun 2021, serta mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJM maka setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja).

Selanjutnya Rencana Kerja OPD disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra PD), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat yang selanjutnya dibahas dalam Forum SKPD dalam menentukan prioritas kegiatan pembangunan dijadikan sebagai bahan penyusunan Rancangan – RKPD setiap tahunnya dan sebagai bahan Musrenbang RKPD.

Sesuai dengan aturan-aturan diatas maka Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB menyusun Dokumen Rencana Kerja Tahun 2024 urusan penunjang bidang kepegawaian didasarkan pada :

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dari Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS serta perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang

tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja OPD terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra).

Dari keterangan diatas dapat diketahui bahwa, penyusunan Renja Perubahan OPD ini tentu harus memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan yang lebih tinggi dan sesuai dengan tata cara penyusunan dan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Pada tahun 2024 merupakan tahun ke-1 pelaksanaan RPD Provinsi NTB Periode 2024-2026, sehingga seluruh Perangkat Daerah diharapkan mampu melakukan akselerasi dalam pencapaian sasaran didalam RPD. Untuk itu berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mempercepat tercapainya saran antara lain :

1. Hasil evaluasi terhadap kinerja pembangunan di Provinsi NTB, terjadi tuntutan masyarakat dan kondisi pembangunan yang sangat dinamis, sehingga diperlukan peninjauan kembali terhadap indikator kinerja, indikator program, strategi, kebijakan dan program prioritas dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan.
2. Terjadinya wabah Pandemi COVID-19 yang berdampak langsung kepada perubahan aktivitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat.
3. Perubahan kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
4. Perubahan nomenklatur program dan kegiatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Mekanisme penyusunan Renja-OPD dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1.1

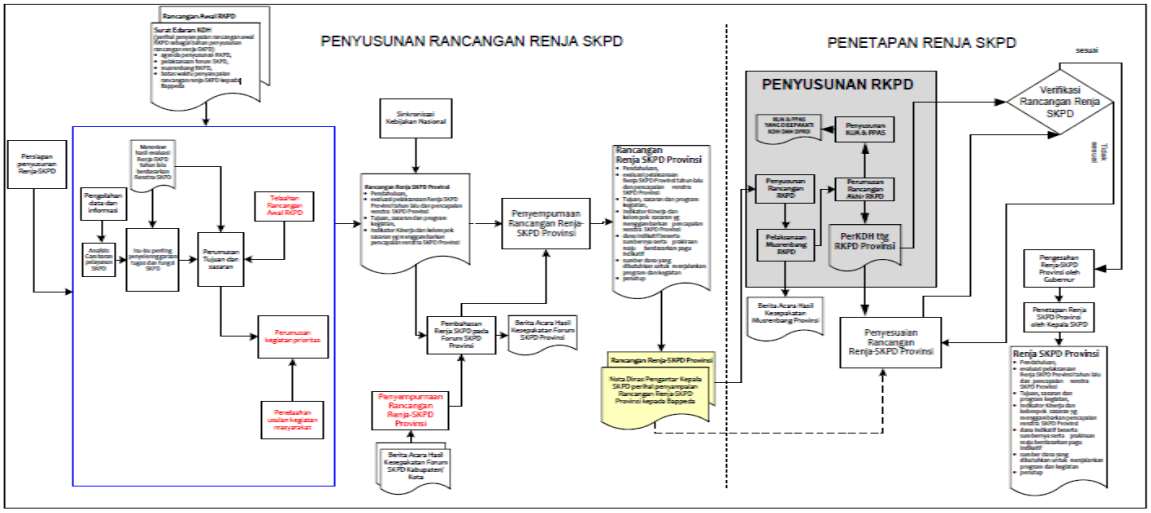

Bagan Alir Penyusunan Renja-OPD

Sesuai dengan Dokumen RPD Provinsi NTB tahun 2024-2026 dan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB Tahun 2024 – 2026, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai Tujuan : **"** Terwujudnya Profesionalitas ASN dengan Penerapan Manajemen SDM ASN Berbasis Sistem Merit**"**, dengan indikator tujuan yakni "Nilai Tingkat Penerapan Sistem Merit". Untuk mencapai tujuan dan indikator OPD tersebut telah dijabarkan kedalam 4 (empat) Sasaran antara lain:

1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengadaan Pegawai sesuai Kebutuhan dngan indikator Nilai Aspek Perencanaan dan Pengadaan;
2. Meningkatnya Kualitas Pengembangan Karir, Promosi dan Mutasi ASN sesuai Kompetensinya dengan indikator Nilai Aspek Pengembangan Karir, Promosi dan Mutasi;
3. Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan, Disiplin dengan indikator Nilai Aspek Manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan, Disiplin serta Perlindungan dan Pelayanan;

4. Meningkatnya Kualitas Sistem Informasi Kepegawaian yangTerintegrasi dengan indikator Nilai Aspek Sistem Informasi.

Oleh sebab itu, guna mencapai Tujuan dan sasaran tersebut, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyusun Renja OPD Tahun 2025 sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan lainnya.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Penunjang Bidang Kepegawaian, menjalankan Misi Ke-2 Gubernur Nusa Tenggara Barat yang tertuang didalam RPD Provinsi NTB 2019-2023 yakni “NTB BERSIH DAN

MELAYANI” dimana Pemerintah Provinsi NTB berfokus kepada percepatan/ Akselerasi Transformasi Birokrasi Yang Bersih dan Melayani.

1.2 DASAR HUKUM

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dilaksanakan berdasarkan landasan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelanggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinanan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;

11. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 38 tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalisme ASN;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menetri PAN-RB Nomor 3 Tahun 2020 Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara;
15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman tata Cara dan Pelaskanaan Pengukuran Indeks Profesionalisme ASN;
16. Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 tahun 2019 tentang tata Cara Penilaian Mandiri Sistem merit dalam Manajemen ASN
17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
18. Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2026;
19. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara barat Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026
20. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 49 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
21. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas-DInas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

22. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 25 Tahun 2024 tentang RKPD Provinsi NTB Tahun 2025

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini diantaranya adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program / kegiatan dan review pelaksanaan program / kegiatan tahun sebelumnya yang selanjutnya dijadikan acuan untuk menyusun perencanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2025.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2025 bertujuan untuk:

1. Menetapkan prioritas pembangunan yang dilaksanakan tahun 2025;
2. Menetapkan indikator kinerja dari program dan kegiatan yang disertai indikasi perkiraan kebutuhan pagu anggaran yang akan dilaksanakan pada tahun 2025;
3. Mengukur / mengevaluasi pencapaian target kinerja OPD;
4. Mengendalikan pelaksanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistimatika penulisan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 terdiri dari :

- Bab I : Pendahuluan
  - 1.1 Latar Belakang
  - 1.2 Landasan Hukum
  - 1.3 Maksud dan Tujuan
  - 1.4 Sistimatika Penulisan

- Bab II : Hasil Evaluasi RENJA Perangkat Daerah Tahun 2024
  - 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
  - 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
  - 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
  - 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

- Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
  - 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
  - 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Perangkat Daerah
  - 3.3 Program dan Kegiatan

- Bab IV : Rencana Kerja Perubahan dan Pendanaan Perangkat Daerah
- Bab V : Penutup

BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Capaian kinerja tahun 2024 bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya dan target akhir RPD belum bisa dilakukan, hal ini dikarenakan adanya perubahan regulasi tentang nomenkelatur Program/kegiatan dan sub Kegiatan sebagai tindak lanjut dari amanat Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Berikut kami sajikan Capaian Renstra BKD Provinsi NTB tahun 2019 s.d. 2023 :

Tabel 2.1

Capaian Renja BKD Provinsi NTB s.d Triwulan III Tahun 2024

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	NAMA OPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENETAPAN APBD/DPA TAHUN 2024			
					TARGET KINERJA	PAGU (Rp)	Realisasi (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya Profesionalisme ASN	•Mewujudkan Majemen ASN yang Meritrokrasi	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai Penerapan SIstem Merit	POINT	301.5	15,906,746,950	11,633,200,582	73.13
	•Mewujudkan ASN yang profesional, berintegritas, netral dan berkinerja		Indeks Profesionalisme ASN dimensi Kualifikasi, Kinerja dan Disiplin	%	41.98			
A	Meningkatnya layanan Penunjang urusan pemerintah Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai SAKIP Lingkup OPD	Poin	BB	14,914,717,450	10,925,940,277	73.26
			Tingkat tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD	Persen	100			
			Nilai Raport SPBE Lingkup OPD	Poin	100			
			Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD	Persen	90			
1	meningkatnya Kwalitas Dokumen Perencanaan da Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan da Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen	21	161,142,400	119,028,128	73.87
1.1.	meningkatnya kwalitas Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	61,503,900	42,645,400	69.34

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	NAMA OPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENETAPAN APBD/DPA TAHUN 2024			
					TARGET KINERJA	PAGU (Rp)	Realisasi (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.2.	meningkatnya kwalitas Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12	70,038,500	50,785,228	72.51
1.3.	meningkatnya kwalitas Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	29,600,000	25,597,500	86.48
2	**meningkatnya kwalitas Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**12,745,833,370**	**9,180,762,482**	**72.03**
2.1.	meningkatnya kwalitas Pembayaran gaji dan Tunjangan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	90	12,577,454,370	9,041,094,622	71.88
2.3	meningkatnya kwalitas Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	78,780,000	57,261,500	72.69
2.4	meningkatnya kwalitas Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	22,280,000	22,280,000	100.00
2.5	meningkatnya kwalitas Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	10,595,000	10,535,000	99.43
2.6	meningkatnya kwalitas Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	4	56,724,000	49,591,360	87.43
3	**meningkatnya kwalitas Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**48,884,000**	**32,684,000**	**66.86**
3.1	meningkatnya kwalitas Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	48,884,000	32,684,000	66.86
5	**meningkatnya kwalitas pelayanan administrasi umum perangkat daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah**	**Persen**	**100**	**885,469,600**	**777,347,580**	**87.79**
5.1	meningkatnya kwalitas Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	12,505,800	8,502,320	67.99
5.2	meningkatnya kwalitas Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10			

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	NAMA OPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENETAPAN APBD/DPA TAHUN 2024			
					TARGET KINERJA	PAGU (Rp)	Realisasi (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.3	meningkatnya kwalitas Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	131,573,800	89,939,518	68.36
5.4	meningkatnya kwalitas Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	20,600,000	17,170,000	83.35
5.5	meningkatnya kwalitas Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	3,780,000	2,600,000	68.78
5.6	meningkatnya kwalitas Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	60	30,410,000	23,749,720	78.10
5.7	meningkatnya kwalitas Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	200	632,500,000	595,146,022	94.09
5.8	meningkatnya kwalitas Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2	28,500,000	14,640,000	51.37
5.9	meningkatnya kwalitas Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	2	25,600,000	25,600,000	100.00
6	**meningkatnya kwalitas pengadaan Barang Milik Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pengadaan Barang Milik Daerah**	**persen**	**100**	**0**	**0**	
6.1	meningkatnya kwalitas Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	50			
7	**meningkatnya kwalitas penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**Persen**	**100**	**853,038,080**	**639,223,206**	**74.93**
7.1	meningkatnya kwalitas Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	10,370,000	9,850,000	94.99
7.2	meningkatnya kwalitas Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	303,750,000	231,573,206	76.24
7.3	meningkatnya kwalitas Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	538,918,080	397,800,000	73.81
8	**meningkatnya kwalitas Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara**	**Persen**	**100**	**220,350,000**	**176,894,881**	**80.28**
8.1	meningkatnya kwalitas Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	25	189,100,000	153,394,881	81.12

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	NAMA OPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENETAPAN APBD/DPA TAHUN 2024			
					TARGET KINERJA	PAGU (Rp)	Realisasi (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8.2	meningkatnya kwalitas Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4	12,750,000	5,000,000	39.22
8.3	meningkatnya kwalitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	18,500,000	18,500,000	100.00
B	**Mewujudkan Manajemen SDM Aparatur yang Meritrokrasi**	**Program Kepegawaian Daerah**	**Nilai Penerapan Merit Sistem**	**Nilai**	**338.5**	**842,370,000**	**579,302,000**	**68.77**
	Mewujudkan ASN yang profesional, berintegritas, netral dan berkinerja		**Persentase Dimensi Kualifikasi Pendidkan ASN sesuai dengan Jenjang Pendidikan**	**Persen**	**13.40**			
			Persentase Dimensi Kinerja ASN yang Bernilai Baik	**Persen**	**23.60**			
			Persentase Aspek Disiplin ASN	**Persen**	**4.97**			
1	**Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pegawai yang efektif, Pengadaan yang transparan dan akuntabel, Sistem Informasi yang terintegrasi serta Perlindungan dan Pelayanan yang exelent**	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan, Sistem Informasi serta Perlindungan dan Pelayanan**	**Poin**	**114**	**323,870,000**	**216,974,000**	**66.99**
1.1	Meningkatnya Kualitas Pengadaan PNS dan PPK yang transparan, kompetitif, akuntabel, bebas KKN, tidak diskriminatif	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	1	136,490,000	92,210,000	67.56
1.2	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian yang Tepat Waktu	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	1	34,980,000	29,160,000	83.36
1.3	Meningkatnya Kesejahteraan ASN melalui pemberian perlindungan dan Pelayanan profesi ASN	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Lembaga	1	46,500,000	25,820,000	55.53
1.4	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian yang terintegrasi	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	105,900,000	69,784,000	65.90
2	**Meningkatnya Kualitas Promosi dan Mutasi ASN sesuai dengan kualifikasi, kompetensi dan kontribusi terhadap organisasi**	**Mutasi dan Promosi ASN**	**Nilai Aspek Promosi dan Mutasi**	**Poin**	**22.5**	**271,340,000**	**214,938,000**	**79.21**
2.1	Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah yang sesuai dengan Kebutuhan Organisasi	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	Dokumen	1	60,660,000	43,024,000	70.93

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	NAMA OPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENETAPAN APBD/DPA TAHUN 2024			
					TARGET KINERJA	PAGU (Rp)	Realisasi (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.2	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN secara tepat waktu	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Laporan	2	82,580,000	59,330,000	71.85
2.3	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Promosi ASN sesuai dengan kaidah merit sistem	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	8	128,100,000	112,584,000	87.89
3	**Meningkatnya kualitas Pengembangan karir sesuai dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karir**	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Nilai Aspek Pengembangan karir**	**Poin**	**60**	**129,760,000**	**87,150,000**	**67.16**
	Meningkatnya Kualifikasi Pendidikan ASN		**Indeks Kualifikasi ASN**	**Persen**	**13.40**			
3.1	Meningkatnya kualitas engelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN secara berkala	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Dokumen	1	37,500,000	20,250,000	54.00
3.2	Meningkatnya kualitas Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional sesuai dengan syarat jabatan	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Orang	20	37,500,000	31,050,000	82.80
3.3	Meningkatnya kualitas pembinaan fungsional ASN secara berkala	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	Orang	20	54,760,000	35,850,000	65.47
4	**Meningkatnya predikat kinerja organisasi, produktifitas kinerja individu dan kesejahteraaan ASN berdasarkan capaian kinerja dan kedisiplinan ASN.**	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Nilai Aspek manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan dan Disiplin**	**Poin**	**105**	**117,400,000**	**60,240,000**	**51.31**
	Meningkatnya Kinerja ASN yang Objektif dan Produktif		**Indeks Kinerja ASN**	**Persen**	**23.6**			
	Meningkatkan Disiplin, Integritas dan Netralitas ASN		**Indeks Disiplin ASN**	**Persen**	**4.97**			
4.1	Meningkatnya kualitas Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur yang Objektif dan akuntabel	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	1	39,040,000	29,825,000	76.40
4.2	Meningkatnya kualitas ASN yang Diberikan Penghargaan sesuai dengan Kinerja dan Disiplin	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Orang	200	32,400,000	17,225,000	53.16
4.3	Meningkatnya kualitas ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	20	45,960,000	13,190,000	28.70
	UPPK					**149,659,500**	**127,958,305**	**85.50**
1	**meningkatnya kwalitas pelayanan administrasi umum perangkat daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah**	**Persen**	**100**	**44,259,500**	**41,431,305**	**93.61**

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	NAMA OPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENETAPAN APBD/DPA TAHUN 2024			
					TARGET KINERJA	PAGU (Rp)	Realisasi (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1	meningkatnya kwalitas Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	6,839,500	4,416,000	64.57
1.2	meningkatnya kwalitas Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	2,920,000	2,540,000	86.99
1.3	meningkatnya kwalitas Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	200	34,500,000	34,475,305	99.93
2	**Meningkatnya kualitas Pengembangan karir sesuai dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karir**	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Nilai Aspek Pengembangan karir**	**Poin**	**60**	**105,400,000**	**86,527,000**	**82.09**
2.1	Meningkatnya kapasitas Kinerja ASN guna mendukung kinerja organisasi	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	400	5,500,000	3,250,000	59.09
2.2	Meningkatnya ketersediaan data Potensi ASN secara lengkap dan akurat	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Dokumen	3	99,900,000	83,277,000	83.36

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk menjawab tantangan reformasi birokrasi dalam rangka percepatan pencapaian nilai indeks reformasi birokrasi untuk periode RPD 2024-2026 maka Pemerintah Provinsi NTB merumuskan sasaran, yaitu dengan meningkatkan Profesionalisme ASN melalui strategi (1) Penataan Sistem Manajemen SDM ASN berbasis Sistem Merit dan, (2) Peningkatan Kapasitas ASN melalui Pengembangan Kompetensi Manajerial, Teknis dan Fungsional.

Strategi Penataan Sistem Manajemen SDM ASN berbasis Sistem Merit diatas diterjemahkan ke dalam arah kebijakan pembangunan Provinsi NTB yakni dengan:

1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pengadaan Pegawai sesuai Kebutuhan;
2. Meningkatkan Kualitas Pengembangan Karir, Promosi dan Mutasi ASN sesuai Kompetensinya;
3. Meningkatkan Kualitas Manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan, Disiplin;

4. Meningkatkan Kualitas Sistem Informasi Kepegawaian yangTerintegrasi

Dari strategi-strategi diatas, Badan Kepegawaian Darah Provinsi NTB telah melakukan beberapa inovasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan aparatur, diantaranya dengan penerapan layanan E-Government dengan maksud memberikan pelayanan kepada stakeholder dengan tujuan stakeholder dapat dengan mudah dan cepat dalam memperoleh informasi. Selain itu BKD Provinsi NTB mengembangkan sistem informasi untuk menunjang kinerja yang disebut SIMADU (Sistem Management ASN Terpadu), dimana sistem ini merupakan sistem aplikasi yang memudahkan user, operator bahkan ASN itu sendiri dalam memanfaatkan, mengolah, dan mengelola data kepegawaian sehingga mampu terdokumentasi dengan baik dalam rangka pembinaan, penempatan dan pengembangan karier ASN.

Disamping itu diterapkannya juga sistem aplikasi e-Kinerja merupakan sistem aplikasi yang bertujuan untuk membantu dalam penilaian kinerja secara individu. E-Kinerja ini selain dapat mengukur tingkat kinerja masing-masing ASN juga terintegrasi dengan sistem kehadiran bebasis online sehingga dapat menjadi alat untuk memonitoring dan mengevaluasi tingkat disiplin ASN. Lebih lanjut, e-Kinerja juga akan terintegrasi dengan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang berbasis kinerja, sehingga diharapkan kesejahteraan Pegawai dapat diwujudkan.

Berikut kami sajikan data Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat:

Tabel. 2.2

Pencapaian Kinerja Sistem Merit Provinsi NTB

NO	ASPEK	2019		2020		2021		2022		2023	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	capaian	Target	capaian
1	Perencanaan Kebutuhan	35	35	35	35	40	37,5	40	37,5	40	37.5
2	Pengadaan	34	34	40	40	40	40	40	40	40	40
3	Pengembangan Karir	25	25	37,5	37,5	55	37,5	82,5	52,5	102.5	60
4	Promosi dan Mutasi	20	20	25	25	32,5	25	32,5	22,5	32.5	17.5
5	Manajemen Kinerja	67,5	67,5	75	75	80	75	80	65	80	62.5

NO	ASPEK	2019		2020		2021		2022		2023	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	capaian	Target	capaian
6	Perlindungan dan Pelayanan	14	14	14	14	14	14	16	16	16	16
7	Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	30	30	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	40	35
8	Sistem Informasi	12	12	15	15	16	15	19	16	22	16
TOTAL NILAI PENERAPAN SISTEM MERIT		237,5	237,5	279,0	279,0	315,0	281,5	347,5	287,0	373.0	284.5
PERSENTASE CAPAIAN		100,00		100,00		89,37		82,59		76,27	
SEBUTAN		KURANG		BAIK		BAIK		BAIK		BAIK	

Untuk mengukur pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan capaian tujuan organisasi, maka Badan kepegawaian Daerah pada tahun 2019 capaian kinerja berada pada nilai 237.5 atau berada pada kategori II dengan sebutan Kurang. Namun pada akhir tahun Renstra yaitu tahun 2023, Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB berada pada nilai 76,27 atau berada pada kategori III dengan sebutan Baik.

Tabel. 2.3

Pencapaian Kinerja Indeks Profesionalisme ASN Provinsi NTB

NO	Dimensi IPA	CAPAIAN IPA											
		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
		Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)
1	Kualifikasi	12.00	12.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.37	13.4	21.19	13.4	21.10
2	Kompetensi	23.00	16.00	24.00	16.00	25.00	25.50	27.00	23.24	29.02	26.58	31.03	26.75
3	Kinerja	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	21.42	23.6	24.87	23.6	24.95
4	Disiplin	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.97	4.98	5	4.97	5.00
Nilai IPA		65.00	58.00	67.00	59.00	68.00	68.50	70.00	63.00	71.00	77.64	73.00	77.80
CAPAIAN		89.23		88.06		100.74		90.00		109.35		106.58	
KATEGORI		SANGAT RENDAH		SANGAT RENDAH		RENDAH		RENDAH		SEDANG		SEDANG	

Pencapaian kinerja Indeks Profesionalisme ASN Provinsi NTB pada tahun 2019 berada pada nilai 89.23 poin dengan kategori sangat rendah. Sedangkan pada akhir tahun renstra yaitu 2023 nlilai Indeks Profesionalisme ASN Provnisi NTB berada pada nilai 109,35 dengan kategori sedangkan pada tahun berjalan, sampai dengan bulan September 2024 nilai IPA Provinsi NTB berada pada nilai 106,58 dengan kategori sedang.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dari hasil evaluasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) pada 2018 dan 2019 memperlihatkan masih sangat sedikit kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang menerapkan manajemen sumber daya manusia (SDM) dengan baik. Area perubahan yang berkaitan dengan mentalitas aparatur sipil negara (ASN) malah tidak terlihat program dan gaungnya. Kapabilitas dan integritas ASN pun masih banyak dipertanyakan orang.

Masyarakat saat ini menuntut adanya peningkatan pelayanan prima atas kinerja pemerintah serta berbagai kebijakan yang dilakukannya. Sebagai upaya untuk menjawab tuntutan masyarakat tersebut, pemerintah telah menetapkan beberapa aturan yang diharapkan dapat memperbaiki segala kekurangan yang ada antara lain dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berkaitan dengan peran Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan penunjang di bidang kepegawaian, masalah-masalah dan isu-isu yang selalu menjadi pusat perhatian dan perbincangan, dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Perencanan Kebutuhan Pegawai Belum berdarkan analisis rencana kebutuhan pegawai berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta belum memiliki rencana kebutuhan pegawai jangka menengah 5 (tahun);

2. Prasangka Pengadaan CPNS/PPPK berbau Kolusi, Korupsi dan Nepotisme masih terasa didalam masyarakat;
3. Pembinaan dan pengembangan karir belum seutuhnya menerapkan *Merit System;*
4. Penempatan belum berdasarkan kualifikasi dan kompetensi;
5. Penilaian kinerja belum dijadikan acuan dalam proses pengembangan karir ASN;
6. Masih adanya pelanggaran Disiplin dan Kode Etik ASN;
7. Sistem Informasi Kepegawaian belum terintegrasi dengan Sistem Penilaian Kinerja dan Sistem Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Sebagai implementasi dari visi dan misi serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2009 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka proses pembangunan dan pelayanan di bidang kepegawaian ditopang oleh 2 (dua) program yakni :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
2. Program Kepegawaian Daerah.

Didalam Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB Tahun 2024-2026 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 9 (sembilan) kegiatan antara lain:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
6. Administrasi Umum Perangkat Daerah
7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sedangan untuk Program Kepegawaian Daerah terdiri dari 4 (empat) Kegiatan, diantaranya :

1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN;
2. Mutasi dan Promosi ASN;
3. Pengembangan Kompetensi ASN;
4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.

Selanjutnya, untuk mengukur tingkat capaian kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan guna mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka perlu adanya indikator kinerja dari setiap sasaran strategis serta program/kegiatan yang akan dilaksanakan. Sebagai indikator kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mewujudkan sasaran strategis serta program/kegiatan yang direncanakan, maka telah ditetapkan indikator dari masing-masing sasaran strategis serta pendanaan indikatif dari masing-masing kegiatan untuk lima tahun mendatang sebagai berikut :

Tabel 2.4

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB (berdasarkan permendagri 90/2019)

Kode	Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF						Penanggung jawab
					2024		2025		2026		
					Kin	Pagu	Kin	Pagu	Kin	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
x											
x.xx	Badan Kepegawaian Daerah					22.048.000.000		24.252.800.000		26.678.080.000	
x.xx.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Nilai SAKIP Lingkup OPD	Poin	BB	19.353.000.000	BB	21.288.300.000	A	23.417.130.000	Kepala BKD

Kode	Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF						Penanggung jawab
					2024		2025		2026		
					Kin	Pagu	Kin	Pagu	Kin	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Tingkat tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD	Persen	100		100		100		
			Nilai Raport SPBE Lingkup OPD	Poin	100		100		100		
			Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD	Persen	90		90		90		
x.xx.01.101	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	meningkatnya Kwalitas Dokumen Perencanaan da Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan da Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen	21	225.000.000	21	247.500.000	21	272.250.000	Sekretaris
x.xx.01.101.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	meningkatnya kwalitas Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	35.000.000	1	38.500.000	1	42.350.000	Sekretaris
x.xx.01.101.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	meningkatnya kwalitas Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	35.000.000	1	38.500.000	1	42.350.000	Sekretaris
x.xx.01.101.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	meningkatnya kwalitas Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	35.000.000	1	38.500.000	1	42.350.000	Sekretaris
x.xx.01.101.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	meningkatnya kwalitas Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	35.000.000	1	38.500.000	1	42.350.000	Sekretaris
x.xx.01.101.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	meningkatnya kwalitas Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	35.000.000	1	38.500.000	1	42.350.000	Sekretaris

Kode	Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF						Penanggung jawab
					2024		2025		2026		
					Kin	Pagu	Kin	Pagu	Kin	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
x.xx.01.101.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	meningkatnya kwalitas Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12	25.000.000	12	27.500.000	12	30.250.000	Sekretaris
x.xx.01.101.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	meningkatnya kwalitas Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	25.000.000	4	27.500.000	4	30.250.000	Sekretaris
x.xx.01.102	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	meningkatnya kwalitas Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	10.690.000.000	100	11.759.000.000	100	12.934.900.000	Sekretaris
x.xx.01.102.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	meningkatnya kwalitas Pembayaran gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	90	10.500.000.000	90	11.550.000.000	90	12.705.000.000	Sekretaris
x.xx.01.102.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	meningkatnya kwalitas Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	15.000.000	12	16.500.000	12	18.150.000	Sekretaris
x.xx.01.102.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	meningkatnya kwalitas Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	60.000.000	12	66.000.000	12	72.600.000	Sekretaris
x.xx.01.102.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	meningkatnya kwalitas Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	15.000.000	12	16.500.000	12	18.150.000	Sekretaris
x.xx.01.102.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	meningkatnya kwalitas Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	35.000.000	1	38.500.000	1	42.350.000	Sekretaris

Kode	Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF						Penanggung jawab
					2024		2025		2026		
					Kin	Pagu	Kin	Pagu	Kin	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
x.xx.01.102.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	meningkatnya kwalitas Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	15.000.000	1	16.500.000	1	18.150.000	Sekretaris
x.xx.01.102.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	meningkatnya kwalitas Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	4	15.000.000	4	16.500.000	4	18.150.000	Sekretaris
x.xx.01.102.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	meningkatnya kwalitas Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	2	35.000.000	2	38.500.000	2	42.350.000	Sekretaris
x.xx.01.103	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	meningkatnya kwalitas Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	Persen	100	150.000.000	100	165.000.000	100	181.500.000	Sekretaris
x.xx.01.103.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	meningkatnya kwalitas Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	15.000.000	1	16.500.000	1	18.150.000	Sekretaris
x.xx.01.103.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	meningkatnya kwalitas Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	15.000.000	1	16.500.000	1	18.150.000	Sekretaris
x.xx.01.103.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	meningkatnya kwalitas Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	2	15.000.000	2	16.500.000	2	18.150.000	Sekretaris
x.xx.01.103.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	meningkatnya kwalitas Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	15.000.000	1	16.500.000	1	18.150.000	Sekretaris

Kode	Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF						Penanggung jawab
					2024		2025		2026		
					Kin	Pagu	Kin	Pagu	Kin	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
x.xx.01.103.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	meningkatnya kwalitas Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	15.000.000	2	16.500.000	2	18.150.000	Sekretaris
x.xx.01.103.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	meningkatnya kwalitas Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	60.000.000	1	66.000.000	1	72.600.000	Sekretaris
x.xx.01.103.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	meningkatnya kwalitas Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	15.000.000	1	16.500.000	1	18.150.000	Sekretaris
x.xx.01.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	meningkatnya kwalitas Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	persentase pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	Dokumen	100	275.000.000	100	302.500.000	100	332.750.000	Sekretaris
x.xx.01.105.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	meningkatnya kwalitas Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	1	5.000.000	1	5.500.000	1	6.050.000	Sekretaris
x.xx.01.105.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	meningkatnya kwalitas Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	20.000.000	1	22.000.000	1	24.200.000	Sekretaris
x.xx.01.105.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	meningkatnya kwalitas Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	25.000.000	1	27.500.000	1	30.250.000	Sekretaris
x.xx.01.105.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	meningkatnya kwalitas Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	12	25.000.000	12	27.500.000	12	30.250.000	Sekretaris
x.xx.01.105.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	meningkatnya kwalitas Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	12	15.000.000	12	16.500.000	12	18.150.000	Sekretaris
x.xx.01.105.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	meningkatnya kwalitas Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Orang	4	15.000.000	4	16.500.000	4	18.150.000	Sekretaris

Kode	Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF						Penanggung jawab
					2024		2025		2026		
					Kin	Pagu	Kin	Pagu	Kin	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
x.xx.01.105.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	meningkatnya kwalitas Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Laporan	1	5.000.000	1	5.500.000	1	6.050.000	Sekretaris
x.xx.01.105.08	Pemindahan Tugas ASN	meningkatnya kwalitas ASN yang Dipindahtugaskan	Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan	Orang	4	15.000.000	4	16.500.000	4	18.150.000	Sekretaris
x.xx.01.105.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	meningkatnya kwalitas Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	20	100.000.000	20	110.000.000	20	121.000.000	Sekretaris
x.xx.01.105.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	meningkatnya kwalitas Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	100	25.000.000	100	27.500.000	100	30.250.000	Sekretaris
x.xx.01.105.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	meningkatnya kwalitas Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	100	25.000.000	100	27.500.000	100	30.250.000	Sekretaris
x.xx.01.106	Administrasi Umum Perangkat Daerah	meningkatnya kwalitas pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Persen	100	1.790.000.000	100	1.969.000.000	100	2.165.900.000	Sekretaris
x.xx.01.106.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	meningkatnya kwalitas Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	35.000.000	2	38.500.000	2	42.350.000	Sekretaris
x.xx.01.106.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	meningkatnya kwalitas Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10	200.000.000	10	220.000.000	10	242.000.000	Sekretaris
x.xx.01.106.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	meningkatnya kwalitas Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	60.000.000	2	66.000.000	2	72.600.000	Sekretaris
x.xx.01.106.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	meningkatnya kwalitas Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	300.000.000	2	330.000.000	2	363.000.000	Sekretaris

Kode	Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF						Penanggung jawab
					2024		2025		2026		
					Kin	Pagu	Kin	Pagu	Kin	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
x.xx.01.106.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	meningkatnya kwalitas Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	30.000.000	3	33.000.000	3	36.300.000	Sekretaris
x.xx.01.106.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	meningkatnya kwalitas Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	25.000.000	12	27.500.000	12	30.250.000	Sekretaris
x.xx.01.106.07	Penyediaan Bahan/Material	meningkatnya kwalitas Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	2	20.000.000	2	22.000.000	2	24.200.000	Sekretaris
x.xx.01.106.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	meningkatnya kwalitas Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	60	60.000.000	60	66.000.000	60	72.600.000	Sekretaris
x.xx.01.106.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	meningkatnya kwalitas Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	200	1.000.000.000	200	1.100.000.000	200	1.210.000.000	Sekretaris
x.xx.01.106.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	meningkatnya kwalitas Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2	35.000.000	2	38.500.000	2	42.350.000	Sekretaris
x.xx.01.106.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	meningkatnya kwalitas Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	2	25.000.000	2	27.500.000	2	30.250.000	Sekretaris
x.xx.01.107	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	meningkatnya kwalitas pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah	persen	100	4.460.000.000	100	4.906.000.000	100	5.396.600.000	Sekretaris
x.xx.01.107.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	meningkatnya kwalitas Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	400.000.000		440.000.000		484.000.000	Sekretaris

Kode	Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF						Penanggung jawab
					2024		2025		2026		
					Kin	Pagu	Kin	Pagu	Kin	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
x.xx.01.107.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	meningkatnya kwalitas Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	700.000.000		770.000.000		847.000.000	Sekretaris
x.xx.01.107.03	Pengadaan Alat Besar	meningkatnya kwalitas Unit Alat Besar yang Disediakan	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit				-		-	Sekretaris
x.xx.01.107.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	meningkatnya kwalitas Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Unit				-		-	Sekretaris
x.xx.01.107.05	Pengadaan Mebel	meningkatnya kwalitas Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	60.000.000	1	66.000.000	1	72.600.000	Sekretaris
x.xx.01.107.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	meningkatnya kwalitas Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	50	1.000.000.000	50	1.100.000.000	50	1.210.000.000	Sekretaris
x.xx.01.107.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	meningkatnya kwalitas Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit				-		-	Sekretaris
x.xx.01.107.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	meningkatnya kwalitas Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit				-		-	Sekretaris
x.xx.01.107.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	meningkatnya kwalitas Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	2.000.000.000	1	2.200.000.000	1	2.420.000.000	Sekretaris
x.xx.01.107.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	meningkatnya kwalitas Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	200.000.000	1	220.000.000	1	242.000.000	Sekretaris
x.xx.01.107.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	meningkatnya kwalitas Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	100.000.000	1	110.000.000	1	121.000.000	Sekretaris

Kode	Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF						Penanggung jawab
					2024		2025		2026		
					Kin	Pagu	Kin	Pagu	Kin	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
x.xx.01.108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	meningkatnya kwalitas penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen		965.000.000		1.061.500.000		1.167.650.000	Sekretaris
x.xx.01.108.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	meningkatnya kwalitas Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	15.000.000	12	16.500.000	12	18.150.000	Sekretaris
x.xx.01.108.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	meningkatnya kwalitas Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	300.000.000	12	330.000.000	12	363.000.000	Sekretaris
x.xx.01.108.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	meningkatnya kwalitas Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	50.000.000	4	55.000.000	4	60.500.000	Sekretaris
x.xx.01.108.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	meningkatnya kwalitas Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	600.000.000	4	660.000.000	4	726.000.000	Sekretaris
x.xx.01.109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	meningkatnya kwalitas Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Persen	100	798.000.000	100	877.800.000	100	965.580.000	Sekretaris
x.xx.01.109.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	meningkatnya kwalitas Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	25	300.000.000	25	330.000.000	25	363.000.000	Sekretaris
x.xx.01.109.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	meningkatnya kwalitas Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	18.000.000	1	19.800.000	1	21.780.000	Sekretaris

Kode	Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF						Penanggung jawab
					2024		2025		2026		
					Kin	Pagu	Kin	Pagu	Kin	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
x.xx.01.109.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	meningkatnya kwalitas Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit				-		-	Sekretaris
x.xx.01.109.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	meningkatnya kwalitas Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit				-		-	Sekretaris
x.xx.01.109.05	Pemeliharaan Mebel	meningkatnya kwalitas Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1	10.000.000	1	11.000.000	1	12.100.000	Sekretaris
x.xx.01.109.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	meningkatnya kwalitas Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4	20.000.000	4	22.000.000	4	24.200.000	Sekretaris
x.xx.01.109.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	meningkatnya kwalitas Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit				-		-	Sekretaris
x.xx.01.109.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	meningkatnya kwalitas Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit				-		-	Sekretaris
x.xx.01.109.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	meningkatnya kwalitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	200.000.000	1	220.000.000	1	242.000.000	Sekretaris
x.xx.01.109.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	meningkatnya kwalitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	200.000.000	1	220.000.000	1	242.000.000	Sekretaris
x.xx.01.109.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	meningkatnya kwalitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.500.000	Sekretaris
x.xx.01.109.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	meningkatnya kwalitas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Ha				-		-	Sekretaris
5.03	Kepegawaian							-		-	

Kode	Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF						Penanggung jawab
					2024		2025		2026		
					Kin	Pagu	Kin	Pagu	Kin	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Badan Kepegawaian Daerah							-		-	
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Mewujudkan Manajemen SDM Aparatur yang Meritrokrasi	Nilai Penerapan Merit Sistem	Nilai	301,5	2.695.000.000	338,5	2.964.500.000	369,5	3.260.950.000	Kepala BKD
		Mewujudkan ASN yang profesional, berintegritas, netral dan berkinerja	Persentase Dimensi Kualifikasi Pendidkan ASN sesuai dengan Jenjang Pendidikan	Persen	13,4		13,6		13,8		
			Persentase Dimensi Kinerja ASN yang Bernilai Baik	Persen	23,6		24,4		25,2		
			Persentase Aspek Disiplin ASN	Persen	4,98		4,98		4,99		
5.03.02.101	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pegawai yang efektif, Pengadaan yang transparan dan akuntabel, Sistem Informasi yang terintegrasi serta Perlindungan dan Pelayanan yang exelent	Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan, Sistem Informasi serta Perlindungan dan Pelayanan	Poin	114	970.000.000	116	1.067.000.000	117	1.173.700.000	Kabid. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
5.03.02.101.01	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Dokumen	1	25.000.000	1	27.500.000	1	30.250.000	Kabid. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
5.03.02.101.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Meningkatnya Kualitas Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen	1	35.000.000	1	38.500.000	1	42.350.000	Kabid. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
5.03.02.101.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Meningkatnya Kualitas Pengadaan PNS dan PPK yang transparan, kompetitif, akuntabel, bebas KKN, tidak diskriminatif	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	1	400.000.000	1	440.000.000	1	484.000.000	Kabid. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi

Kode	Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF						Penanggung jawab
					2024		2025		2026		
					Kin	Pagu	Kin	Pagu	Kin	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.03.02.101.04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Meningkatnya Akuntabilitas Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	Laporan	1	30.000.000	1	33.000.000	1	36.300.000	Kabid. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
5.03.02.101.05	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Meningkatnya Kualitas Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Dokumen	1	15.000.000	1	16.500.000	1	18.150.000	Kabid. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
5.03.02.101.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	1	35.000.000	1	38.500.000	1	42.350.000	Kabid. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
5.03.02.101.07	Evaluasi Pemberhentian ASN	Meningkatnya kualitas Laporan Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	Laporan	1	15.000.000	1	16.500.000	1	18.150.000	Kabid. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
5.03.02.101.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Meningkatnya kualitas perlindungan dan Pelayanan profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Lembaga	1	200.000.000	1	220.000.000	1	242.000.000	Kabid. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
5.03.02.101.09	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Meningkatnya kualitas Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Dokumen	1	15.000.000	1	16.500.000	1	18.150.000	Kabid. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
5.03.02.101.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	150.000.000	1	165.000.000	1	181.500.000	Kabid. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
5.03.02.101.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen	1	35.000.000	1	38.500.000	1	42.350.000	Kabid. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi

Kode	Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF						Penanggung jawab
					2024		2025		2026		
					Kin	Pagu	Kin	Pagu	Kin	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.03.02.101.12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Meningkatnya kualitas Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Laporan	1	15.000.000	1	16.500.000	1	18.150.000	Kabid. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
5.03.02.102	Mutasi dan Promosi ASN	Meningkatnya Kualitas Promosi dan Mutasi ASN sesuai dengan kualifikasi, kompetensi dan kontribusi terhadap organisasi	Nilai Aspek Promosi dan Mutasi	Poin	22,5	700.000.000	30	770.000.000	37,5	847.000.000	Kabid Mutasi dan Promosi
5.03.02.102.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	Dokumen	1	100.000.000	1	110.000.000	1	121.000.000	Kabid Mutasi dan Promosi
5.03.02.102.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Laporan	2	250.000.000	2	275.000.000	2	302.500.000	Kabid Mutasi dan Promosi
5.03.02.102.03	Pengelolaan Promosi ASN	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	8	350.000.000	8	385.000.000	8	423.500.000	Kabid Mutasi dan Promosi
5.03.02.103	Pengembangan Kompetensi ASN	Meningkatnya kualitas Pengembangan karir sesuai dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karir	Nilai Aspek Pengembangan karir	Poin	60	690.000.000	80	759.000.000	100	834.900.000	Kabid. Pengembangan Aparatur
		Meningkatnya Kualifikasi Pendidikan ASN	Persentase Dimensi Kualifikasi Pendidkan ASN sesuai dengan Jenjang Pendidikan	persen	13,40		13,60		13,80		
5.03.02.103.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Meningkatnya kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	400	25.000.000	400	27.500.000	400	30.250.000	Kabid. Pengembangan Aparatur
5.03.02.103.02	Pengelolaan Assessment Center	Meningkatnya ketersediaan data Potensi ASN	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Dokumen	3	350.000.000	3	385.000.000	3	423.500.000	Kabid. Pengembangan Aparatur

Kode	Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF						Penanggung jawab
					2024		2025		2026		
					Kin	Pagu	Kin	Pagu	Kin	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.03.02.103.03	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Meningkatnya kualitas engelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Dokumen	1	25.000.000	1	27.500.000	1	30.250.000	Kabid. Pengembangan Aparatur
5.03.02.103.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Meningkatnya Kwalitas Kualifikasi Pendidikan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	Dokumen	1	25.000.000	1	27.500.000	1	30.250.000	Kabid. Pengembangan Aparatur
5.03.02.103.05	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Meningkatnya kualitas oordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Dokumen	1	25.000.000	1	27.500.000	1	30.250.000	Kabid. Pengembangan Aparatur
5.03.02.103.06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Meningkatnya kualitas Layanan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Sertifikasi Jabatan ASN	Orang	20	25.000.000	20	27.500.000	20	30.250.000	Kabid. Pengembangan Aparatur
5.03.02.103.07	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Meningkatnya kualitas Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Laporan	1	25.000.000	1	27.500.000	1	30.250.000	Kabid. Pengembangan Aparatur
5.03.02.103.08	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Meningkatnya kualitas Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Orang	20	25.000.000	20	27.500.000	20	30.250.000	Kabid. Pengembangan Aparatur
5.03.02.103.09	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Meningkatnya kualitas Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Dokumen	2	25.000.000	2	27.500.000	2	30.250.000	Kabid. Pengembangan Aparatur
5.03.02.103.10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Meningkatnya kualitas Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Orang	20	25.000.000	20	27.500.000	20	30.250.000	Kabid. Pengembangan Aparatur
5.03.02.103.11	Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat Fungsional	Meningkatnya kualitas Hasil Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat Fungsional	Laporan	1	15.000.000	1	16.500.000	1	18.150.000	Kabid. Pengembangan Aparatur
5.03.02.103.12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Meningkatnya kualitas Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Laporan	1	15.000.000	1	16.500.000	1	18.150.000	Kabid. Pengembangan Aparatur
5.03.02.103.13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Meningkatnya kualitas pembinaan fungsional ASN	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	Orang	20	35.000.000	20	38.500.000	20	42.350.000	Kabid. Pengembangan Aparatur

Kode	Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF						Penanggung jawab
					2024		2025		2026		
					Kin	Pagu	Kin	Pagu	Kin	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.03.02.103.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Meningkatnya kualitas Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Dokumen	1	25.000.000	1	27.500.000	1	30.250.000	Kabid. Pengembangan Aparatur
5.03.02.103.15	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Meningkatnya kualitas Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Laporan	1	25.000.000	1	27.500.000	1	30.250.000	Kabid. Pengembangan Aparatur
5.03.02.104	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Meningkatnya predikat kinerja organisasi, produktifitas kinerja individu dan kesejahteraaan ASN berdasarkan capaian kinerja dan kedisiplinan ASN.	Nilai Aspek manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	Poin	105	335.000.000	112,5	368.500.000	115	405.350.000	Kabid. Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan
		Meningkatnya Kinerja ASN	Persentase Dimensi Kinerja ASN yang Bernilai Baik	Persen	23,6		24,4		25,2		
		Meningkatnya Disiplin ASN	Persentase Aspek Disiplin ASN	Persen	4,98		4,98		4,99		
5.03.02.104.01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Meningkatnya kualitas Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	1	15.000.000	1	16.500.000	1	18.150.000	Kabid. Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan
5.03.02.104.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Meningkatnya kualitas Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	1	120.000.000	1	132.000.000	1	145.200.000	Kabid. Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan
5.03.02.104.03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Meningkatnya kualitas Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Laporan	12	15.000.000	12	16.500.000	12	18.150.000	Kabid. Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan
5.03.02.104.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Meningkatnya kualitas ASN yang Diberikan Penghargaan	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Orang	200	35.000.000	200	38.500.000	200	42.350.000	Kabid. Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan

Kode	Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF						Penanggung jawab
					2024		2025		2026		
					Kin	Pagu	Kin	Pagu	Kin	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.03.02.104.05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Meningkatnya kualitas ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Orang	200	35.000.000	200	38.500.000	200	42.350.000	Kabid. Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan
5.03.02.104.06	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Meningkatnya kualitas Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Dokumen	1	15.000.000	1	16.500.000	1	18.150.000	Kabid. Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan
5.03.02.104.07	Pembinaan Disiplin ASN	Meningkatnya kualitas ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	20	35.000.000	20	38.500.000	20	42.350.000	Kabid. Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan
5.03.02.104.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Meningkatnya kualitas Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	1	25.000.000	1	27.500.000	1	30.250.000	Kabid. Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan
5.03.02.104.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Meningkatnya kualitas Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Dokumen	1	25.000.000	1	27.500.000	1	30.250.000	Kabid. Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan
5.03.02.104.10	Evaluasi Disiplin ASN	Meningkatnya kualitas Hasil Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	Laporan	2	15.000.000	2	16.500.000	2	18.150.000	Kabid. Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Rencana Strategis Badan Kepegawian Negara tahun 2020-2024 yang memiliki Visi ”Mewujudkan Pengelola ASN yang Profesional dan Berintegritas untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Yang dijabarkan dalam 5 pilar yang menjadi misi Badan Kepegawaian Negara yakni meningkatkan kualitas ASN melalui:

1. Pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN;
2. Penyelenggaraan manajemen ASN;
3. Penyimpanan informasi pegawai ASN;
4. Pengawasan Dan Pengendalian Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN; dan
5. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistim manajemen internal BKN.

Dengan tujuan sebagaimana berikut :

1. Mewujudkan Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN Yang Berkualitas sebagai referensi pembinaan penyelenggaraan Manajemen ASN. Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh pengelolaan PNS yang baik, yang meliputi: penyusunan dan penetapan kebutuhan serta pengadaan PNS; pengembangan PNS (mutasi, promosi, penilaian kinerja dan pola karir); kompensasi (penggajian, tunjangan dan penghargaan); kesejahteraan PNS (Tabungan Hari Tua/THT dan perlindungan sosial).
2. Mewujudkan Penyelenggaraan Manajemen ASN Berkualitas Prima sebagai sarana Mewujudkan manajemen talenta nasional dalam rangka penyelenggaraan Manajemen ASN yang handal dan dinamis. Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh keberhasilan pengelolaan atau manajemen kepegawaian yang sesuai dengan norma, standar dan prosedur (NSP) kepegawaian di lingkungan instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, meningkatnya kinerja PNS dalam melaksanakan pekerjaan, tugas pokok dan fungsi unit kerjanya;
3. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Database Dan Sistem Informasi ASN (SI – ASN) sebagai sarana penerapan sistem merit. Tercapainya tujuan ini

diindikasikan oleh Sistem Informasi ASN yang terpadu dan terintegrasi secara nasional (meliputi pengelolaan data ASN yang handal dan terkini serta penyajian informasi kepegawaian secara akurat dan penyusunan talent pool); serta pengelolaan kepegawaian yang berbasis teknologi informasi (on-line);

4. Mewujudkan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan NSPK Manajemen ASN. Indikasi tercapainya tujuan ini adalah penyelenggaraan Manajemen ASN yang handal dan dinamis. Lebih jauh dari itu, indikasi keberhasilan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian NSPK manajemen ASN akan membuat manajemen ASN berjalan sesuai NSPK yang akan mendorong terciptanya reformasi birokrasi dan good governance; dan
5. Mewujudkan Tata Kelola Manajemen ASN BKN Yang Efektif, Efisien, Dan Akuntabel dalam rangka mewujudkan visi & misi organisasi. Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh meningkatnya pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instasi Permerintah yang Baik, Opini WTP BPK, tingkat kepuasan publik terhadap pelayanan internal BKN, ketersediaan layanan informasi publik, penempatan pegawai yang sesuai dengan kompetensi serta pemenuhan standar dan mutu sarana prasarana kantor.

Sejalan dengan Visi dan Misi serta Tujuan Badan Kepegawaian Negara sebagai instansi Pembina urusan penunjang bidang kepegawaian, maka Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB berusaha menyelaraskan Rencana Strategisnya dengan Rencana Strategis BKN. Benang Merah dari kajian Rencana Strategis BKN adalah pada Periode Renstra 2020-2024 berfokus kepada Pembinaan dan Penyelenggaraan Manajemen ASN. Hal ini senada dengan Tujuan yang terdapat didalam Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB Tahun 2024-2026 yakni “Terwujudnya Profesionalitas ASN dengan Penerapan Manajemen SDM ASN Berbasis Sistem Merit”. Dengan Penerapan SIstem Merit ini diharapkan akan menjawab beberapa aspek pengelolaan kepegawaian diantaranya”

1. Perencanaan Kebutuhan;
2. Pengadaan;
3. Pengembangan karir;
4. Promosi dan Mutasi;

5. Manajemen Kinerja;
6. Penggajian, penghargaan dan disiplin;
7. Perlindungan dan Pelayanan serta;
8. Sistem Informasi.

Dengan perbaikan pada kedelapan aspek ini diharapkan mampu mendongkrak indeks Profesionalisme ASN Provinsi NTB dan pada akhirnya juga meningkatkan Indeks Refomasi Birokrasi Pemerintah Provinsi NTB.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran dari misi dan visi Kepala Daerah yang telah ditetapkan. Tujuan berfungsi mempertajam fokus pelaksanaan misi dan visi Daerah dan diukur dengan indikator tujuan. Tujuan merupakan hasil akhir yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai dengan 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh unit kerja organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Berdasarkan visi dan misi Daerah serta tugas dan fungsi organisasi maka ditetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat selama kurun waktu 3 (tiga) tahun periode 2024 – 2026 yaitu :

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB Tahun 2024-2026

NO	TUJUAN dan SASARAN BKD	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	CAPAIAN 2 TAHUN TERAKHIR		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-		
			2022	2023	2024	2025	2026
A	**Tujuan**						
1	Terwujudnya Profesionalitas ASN Melalui Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Indeks Profesionalisme ASN	63 %	71 %	73 %	74 %	76 %
B	**Sasaran**						
1.	Mewujudkan Manajemen SDM Aparatur yang Meritrokrasi	Nilai Penerapan Sistem Merit	287 Kategori III (baik)	NULL	301,5 Kategori III (baik)	338,5 Kategori IV (sangat baik)	369,5 Kategori IV (sangat baik)
2.	Mewujudkan ASN yang profesional, berintegritas, netral dan berkinerja	Persentase Dimensi Kualifikasi Pendidkan ASN sesuai dengan Jenjang Pendidikan	13,37 %	13,37 %	13,40 %	13,60 %	13,80 %
		Persentase Dimensi Kinerja ASN yang Bernilai Baik	21,42 %	21,42%	23,6%	24,4 %	25,2%
		Persentase Aspek Disiplin ASN	4,97%	4,97%	4,98%	4,98%	4,99%

dari tabel ditas dapat kita lihat Tujuan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB yaitu “Terwujudnya Profesionalitas ASN dengan Penerapan Manajemen SDM ASN Berbasis Sistem Merit” dengan sasaran “Mewujudkan Majemen ASN yang Meritrokrasi”.

Dalam RPD Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2024-2026, Misi kedua yaitu “NTB BERSIH DAN MELAYANI” memiliki tujuan yaitu Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel dengan indikator Tujuan yaitu Indeks Reformasi Birokrasi. Selanjutnya, salah satu sasaran dalam Misi kedua yang berkaitan erat dengan fungsi penunjang urusan kepegawaian adalah pada sasaran ketiga yaitu “Meningkatnya Profesionalisme ASN” dengan indikator sasaran yaitu Indeks Profesionalisme ASN.

Sedangkan didalam Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB Tahun 2024-2026, Tujuan Renstra yaitu “Terwujudnya Profesionalitas ASN dengan Penerapan Manajemen SDM ASN Berbasis Sistem Merit” dengan indikator tujuan yakni “Nilai Sistem Merit” dan “ Indeks Profesionalisme ASN”.

Untuk lebih jelasnya keterkaitan antara tujuan dan sasaran RPD dengan tujuan dan sasaran RENSTRA dapat dilihat dalam tabel berikut

Tabel 3.2
Hubungan Tujuan dan Sasaran BKD Provinsi NTB dengan Tujuan dan Sasaran Dalam RPJMD
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2024 – 2026

No.	RPD					RENSTRA					
	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN		INDIKATOR	PROGRAM		INDIKATOR	KEGIATAN		INDIKATOR
1	Terwujudnya Profesionalitas ASN Melalui Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Indeks Profesionalisme ASN	1	Mewujudkan Manajemen SDM Aparatur yang Meritrokrasi	Nilai Penerapan Sistem Merit	1	Program Kepegawaian Daerah	Nilai Penerapan Sistem Merit	1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan, Sistem Informasi serta Perlindungan dan Pelayanan
			2	Mewujudkan ASN yang profesional, berintegritas, netral dan berkinerja	Indeks Profesionalisme ASN (dimensi Kualifikasi, Kinerja dan DIsiplin)				2	Mutasi dan Promosi ASN	Nilai Aspek Promosi dan Mutasi
									3	Pengembangan Kompetensi ASN	Nilai Aspek Pengembangan karir
									4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Nilai Aspek manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan dan Disiplin

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan penjabaran dari strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan. Dengan demikian program disusun secara nyata, sistematis dan terpadu. Sedangkan Kegiatan merupakan aktivitas yang terukur dari program yang telah ditetapkan. Kegiatan yang dilaksanakan haruslah merupakan kegiatan yang esensial dan dapat terukur.

Berikut beberapa Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Tahun 2024 :

Tabel 3.3

Program dan Kegiatan Tahun 2025 BKD Provinsi NTB

Kode	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja
(1)	(2)	(3)
x		
x.xx	Badan Kepegawaian Daerah	
x.xx.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai SAKIP Lingkup OPD
		Tingkat tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD
		Nilai Raport SPBE Lingkup OPD
		Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD
x.xx.01.101	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan da Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun
x.xx.01.101.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
x.xx.01.101.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
x.xx.01.101.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
x.xx.01.101.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
x.xx.01.101.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
x.xx.01.101.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
x.xx.01.101.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
x.xx.01.102	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kode	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja
(1)	(2)	(3)
x.xx.01.102.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
x.xx.01.102.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
x.xx.01.102.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
x.xx.01.102.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
x.xx.01.102.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
x.xx.01.102.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan
x.xx.01.102.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
x.xx.01.102.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
x.xx.01.103	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah
x.xx.01.103.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
x.xx.01.103.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
x.xx.01.103.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
x.xx.01.103.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
x.xx.01.103.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Kode	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja
(1)	(2)	(3)
x.xx.01.103.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
x.xx.01.103.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
x.xx.01.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah
x.xx.01.105.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
x.xx.01.105.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan
x.xx.01.105.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
x.xx.01.105.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian
x.xx.01.105.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
x.xx.01.105.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan
x.xx.01.105.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas
x.xx.01.105.08	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan
x.xx.01.105.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
x.xx.01.105.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
x.xx.01.105.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
x.xx.01.106	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah
x.xx.01.106.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

Kode	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja
(1)	(2)	(3)
x.xx.01.106.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
x.xx.01.106.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
x.xx.01.106.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
x.xx.01.106.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
x.xx.01.106.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
x.xx.01.106.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan
x.xx.01.106.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
x.xx.01.106.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
x.xx.01.106.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
x.xx.01.106.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
x.xx.01.107	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah
x.xx.01.107.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan
x.xx.01.107.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
x.xx.01.107.03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan
x.xx.01.107.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan
x.xx.01.107.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
x.xx.01.107.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan

Kode	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja
(1)	(2)	(3)
x.xx.01.107.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan
x.xx.01.107.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan
x.xx.01.107.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
x.xx.01.107.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
x.xx.01.107.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
x.xx.01.108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
x.xx.01.108.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
x.xx.01.108.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
x.xx.01.108.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
x.xx.01.108.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
x.xx.01.109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara
x.xx.01.109.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya
x.xx.01.109.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya
x.xx.01.109.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya
x.xx.01.109.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya
x.xx.01.109.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara

Kode	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja
(1)	(2)	(3)
x.xx.01.109.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
x.xx.01.109.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara
x.xx.01.109.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara
x.xx.01.109.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
x.xx.01.109.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
x.xx.01.109.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
x.xx.01.109.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi
5.03	Kepegawaian	
	Badan Kepegawaian Daerah	
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Nilai Penerapan Merit Sistem
5.03.02.101	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan, Sistem Informasi serta Perlindungan dan Pelayanan
5.03.02.101.01	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN
5.03.02.101.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
5.03.02.101.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
5.03.02.101.04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN
5.03.02.101.05	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN
5.03.02.101.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian

Kode	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja
(1)	(2)	(3)
5.03.02.101.07	Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN
5.03.02.101.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi
5.03.02.101.09	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN
5.03.02.101.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
5.03.02.101.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian
5.03.02.101.12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian
5.03.02.102	Mutasi dan Promosi ASN	Nilai Aspek Promosi dan Mutasi
5.03.02.102.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah
5.03.02.102.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
5.03.02.102.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN
5.03.02.103	Pengembangan Kompetensi ASN	Nilai Aspek Pengembangan karir
5.03.02.103.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya
5.03.02.103.02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center
5.03.02.103.03	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
5.03.02.103.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola
5.03.02.103.05	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat
5.03.02.103.06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Sertifikasi Jabatan ASN
5.03.02.103.07	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN

Kode	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja
(1)	(2)	(3)
5.03.02.103.08	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional
5.03.02.103.09	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional
5.03.02.103.10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN
5.03.02.103.11	Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat Fungsional
5.03.02.103.12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN
5.03.02.103.13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina
5.03.02.103.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
5.03.02.103.15	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional
5.03.02.104	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Nilai Aspek manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan dan Disiplin
5.03.02.104.01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
5.03.02.104.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
5.03.02.104.03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
5.03.02.104.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan
5.03.02.104.05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa
5.03.02.104.06	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur
5.03.02.104.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan

Kode	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja
(1)	(2)	(3)
5.03.02.104.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
5.03.02.104.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani
5.03.02.104.10	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Sebagai implementasi dari visi dan misi serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2009 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka proses pembangunan dan pelayanan di bidang kepegawaian ditopang oleh 2 (dua) program yakni :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Kepegawaian Daerah.

Didalam Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB Tahun 2024-2026 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 9 (sembilan) kegiatan antara lain:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
6. Administrasi Umum Perangkat Daerah
7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sedangan untuk Program Kepegawaian Daerah terdiri dari 4 (empat) Kegiatan, diantaranya :

1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN;
2. Mutasi dan Promosi ASN;
3. Pengembangan Kompetensi ASN;
4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.
5.

Selanjutnya, untuk mengukur tingkat capaian kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan guna mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka perlu adanya indikator kinerja dari setiap sasaran strategis serta program/kegiatan yang akan dilaksanakan. Sebagai indikator kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam

mewujudkan sasaran strategis serta program/kegiatan yang direncanakan, maka telah ditetapkan indikator dari masing-masing sasaran strategis serta pendanaan indikatif dari masing-masing kegiatan untuk tiga tahun mendatang sebagai berikut :

Tabel 4.1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB Tahun 2025

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	NAMA OPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENJA TAHUN 2025		PENANGGUNG JAWAB
					TARGET KINERJA	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(16)
Meningkatnya Profesionalisme ASN	•Mewujudkan Majemen ASN yang Meritrokrasi	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai Penerapan SIstem Merit	POINT	369.5	27,277,380,000	Kepala BKD
	•Mewujudkan ASN yang profesional, berintegritas, netral dan berkinerja		Indeks Profesionalisme ASN dimensi Kualifikasi, Kinerja dan Disiplin	%	43.99		
A	Meningkatnya layanan Penunjang urusan pemerintah Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai SAKIP Lingkup OPD	Poin	A	23,417,130,000	Kepala BKD
			Tingkat tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD	Persen	100		
			Nilai Raport SPBE Lingkup OPD	Poin	100		
			Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD	Persen	90		
1	meningkatnya Kwalitas Dokumen Perencanaan da Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan da Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen	21	272,250,000	Sekretaris
1.1.	meningkatnya kwalitas Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	42,350,000	Sekretaris
1.2.	meningkatnya kwalitas Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	42,350,000	Sekretaris

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	NAMA OPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENJA TAHUN 2025		PENANGGUNG JAWAB
					TARGET KINERJA	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(16)
1.3	meningkatnya kwalitas Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	42,350,000	Sekretaris
1.4	meningkatnya kwalitas Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	42,350,000	Sekretaris
1.5	meningkatnya kwalitas Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	42,350,000	Sekretaris
1:06	meningkatnya kwalitas Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12	30,250,000	Sekretaris
1.7	meningkatnya kwalitas Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	30,250,000	Sekretaris
2	**meningkatnya kwalitas Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**12,934,900,000**	**Sekretaris**
2.1.	meningkatnya kwalitas Pembayaran gaji dan Tunjangan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	90	12,705,000,000	Sekretaris
2.2.	meningkatnya kwalitas Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	18,150,000	Sekretaris

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	NAMA OPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENJA TAHUN 2025		PENANGGUNG JAWAB
					TARGET KINERJA	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(16)
2.3	meningkatnya kwalitas Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	72,600,000	Sekretaris
2.4	meningkatnya kwalitas Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	18,150,000	Sekretaris
2.5	meningkatnya kwalitas Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	42,350,000	Sekretaris
2.6	meningkatnya kwalitas Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	18,150,000	Sekretaris
2.7	meningkatnya kwalitas Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	4	18,150,000	Sekretaris
2.8	meningkatnya kwalitas Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	2	42,350,000	Sekretaris
3	**meningkatnya kwalitas Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**181,500,000**	**Sekretaris**
3.1	meningkatnya kwalitas Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	18,150,000	Sekretaris

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	NAMA OPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENJA TAHUN 2025		PENANGGUNG JAWAB
					TARGET KINERJA	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(16)
3.2	meningkatnya kwalitas Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	18,150,000	Sekretaris
3.3	meningkatnya kwalitas Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	2	18,150,000	Sekretaris
3.4	meningkatnya kwalitas Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	18,150,000	Sekretaris
3.5	meningkatnya kwalitas Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	18,150,000	Sekretaris
3.6	meningkatnya kwalitas Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	72,600,000	Sekretaris
3.7	meningkatnya kwalitas Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	18,150,000	Sekretaris
4	**meningkatnya kwalitas Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**persentase pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah**	**Dokumen**	**100**	**332,750,000**	**Sekretaris**
4.1	meningkatnya kwalitas Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	1	6,050,000	Sekretaris
4.2	meningkatnya kwalitas Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	24,200,000	Sekretaris

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	NAMA OPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENJA TAHUN 2025		PENANGGUNG JAWAB
					TARGET KINERJA	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(16)
4.3	meningkatnya kwalitas Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	30,250,000	Sekretaris
4.4	meningkatnya kwalitas Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	12	30,250,000	Sekretaris
4.5	meningkatnya kwalitas Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	12	18,150,000	Sekretaris
4.6	meningkatnya kwalitas Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Orang	4	18,150,000	Sekretaris
4.7	meningkatnya kwalitas Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Laporan	1	6,050,000	Sekretaris
4.8	meningkatnya kwalitas ASN yang Dipindahtugaskan	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan	Orang	4	18,150,000	Sekretaris
4.9	meningkatnya kwalitas Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	20	121,000,000	Sekretaris
4.10	meningkatnya kwalitas Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	100	30,250,000	Sekretaris
4.11	meningkatnya kwalitas Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	100	30,250,000	Sekretaris

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	NAMA OPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENJA TAHUN 2025		PENANGGUNG JAWAB
					TARGET KINERJA	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(16)
5	**meningkatnya kwalitas pelayanan administrasi umum perangkat daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah**	**Persen**	**100**	**2,165,900,000**	**Sekretaris**
5.1	meningkatnya kwalitas Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	42,350,000	Sekretaris
5.2	meningkatnya kwalitas Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10	242,000,000	Sekretaris
5.3	meningkatnya kwalitas Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	72,600,000	Sekretaris
5.4	meningkatnya kwalitas Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	363,000,000	Sekretaris
5.5	meningkatnya kwalitas Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	36,300,000	Sekretaris
5.6	meningkatnya kwalitas Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	30,250,000	Sekretaris
5.7	meningkatnya kwalitas Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	2	24,200,000	Sekretaris
5.8	meningkatnya kwalitas Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	60	72,600,000	Sekretaris
5.9	meningkatnya kwalitas Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	200	1,210,000,000	Sekretaris
5.10	meningkatnya kwalitas Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2	42,350,000	Sekretaris

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	NAMA OPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENJA TAHUN 2025		PENANGGUNG JAWAB
					TARGET KINERJA	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(16)
5.11	meningkatnya kwalitas Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	2	30,250,000	Sekretaris
6	**meningkatnya kwalitas pengadaan Barang Milik Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pengadaan Barang Milik Daerah**	**persen**	**100**	**5,396,600,000**	**Sekretaris**
6.1	meningkatnya kwalitas Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit		484,000,000	Sekretaris
6.2	meningkatnya kwalitas Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		847,000,000	Sekretaris
6.3	meningkatnya kwalitas Unit Alat Besar yang Disediakan	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit		-	Sekretaris
6.4	meningkatnya kwalitas Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Unit		-	Sekretaris
6.5	meningkatnya kwalitas Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	72,600,000	Sekretaris
6.6	meningkatnya kwalitas Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	50	1,210,000,000	Sekretaris
6.7	meningkatnya kwalitas Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit		-	Sekretaris
6.8	meningkatnya kwalitas Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit		-	Sekretaris

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	NAMA OPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENJA TAHUN 2025		PENANGGUNG JAWAB
					TARGET KINERJA	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(16)
6.9	meningkatnya kwalitas Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	2,420,000,000	Sekretaris
6.10	meningkatnya kwalitas Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	242,000,000	Sekretaris
6.11	meningkatnya kwalitas Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	121,000,000	Sekretaris
7	**meningkatnya kwalitas penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**Persen**	**100**	**1,167,650,000**	**Sekretaris**
7.1	meningkatnya kwalitas Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	18,150,000	Sekretaris
7.2	meningkatnya kwalitas Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	363,000,000	Sekretaris
7.3	meningkatnya kwalitas Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	60,500,000	Sekretaris
7.4	meningkatnya kwalitas Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	726,000,000	Sekretaris

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	NAMA OPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENJA TAHUN 2025		PENANGGUNG JAWAB
					TARGET KINERJA	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(16)
8	**meningkatnya kwalitas Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara**	**Persen**	**100**	**965,580,000**	**Sekretaris**
8.1	meningkatnya kwalitas Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	25	363,000,000	Sekretaris
8.2	meningkatnya kwalitas Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	21,780,000	Sekretaris
8.3	meningkatnya kwalitas Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit		-	Sekretaris
8.4	meningkatnya kwalitas Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit		-	Sekretaris
8.5	meningkatnya kwalitas Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1	12,100,000	Sekretaris
8.6	meningkatnya kwalitas Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4	24,200,000	Sekretaris
8.7	meningkatnya kwalitas Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit		-	Sekretaris
8.8	meningkatnya kwalitas Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit		-	Sekretaris

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	NAMA OPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENJA TAHUN 2025		PENANGGUNG JAWAB
					TARGET KINERJA	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(16)
8.9	meningkatnya kwalitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	242,000,000	Sekretaris
8.10	meningkatnya kwalitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	242,000,000	Sekretaris
8.11	meningkatnya kwalitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	60,500,000	Sekretaris
B	**Mewujudkan Manajemen SDM Aparatur yang Meritrokrasi**	**Program Kepegawaian Daerah**	**Nilai Penerapan Merit Sistem**	**Nilai**	**369.5**	**2,807,200,000**	**Kepala BKD**
	Mewujudkan ASN yang profesional, berintegritas, netral dan berkinerja		**Persentase Dimensi Kualifikasi Pendidkan ASN sesuai dengan Jenjang Pendidikan**	**Persen**	**13.8**		
			Persentase Dimensi Kinerja ASN yang Bernilai Baik	**Persen**	**25.2**		
			Persentase Aspek Disiplin ASN	**Persen**	**4.99**		
1	**Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pegawai yang efektif, Pengadaan yang transparan dan akuntabel, Sistem Informasi yang terintegrasi serta Perlindungan dan Pelayanan yang exelent**	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan, Sistem Informasi serta Perlindungan dan Pelayanan**	**Poin**	**117**	**1,173,700,000**	**Kabid. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi**

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	NAMA OPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENJA TAHUN 2025		PENANGGUNG JAWAB
					TARGET KINERJA	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(16)
1.1.	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengadaan ASN yang transparan, dan akuntabel	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Dokumen	1	30,250,000	Kabid. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
1.2	Meningkatnya Kualitas Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN sesuai dengan ANJAB dan ABK	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen	1	42,350,000	Kabid. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
1.3	Meningkatnya Kualitas Pengadaan PNS dan PPK yang transparan, kompetitif, akuntabel, bebas KKN, tidak diskriminatif	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	1	484,000,000	Kabid. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
1.4.	Meningkatnya Akuntabilitas Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	Laporan	1	36,300,000	Kabid. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
1.5	Meningkatnya Kualitas Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN yang Tepat Waktu	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Dokumen	1	18,150,000	Kabid. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
1.6	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian yang Tepat Waktu	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	1	42,350,000	Kabid. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
1.7	Meningkatnya kualitas Laporan Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN secara real time	Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	Laporan	1	18,150,000	Kabid. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
1.8	Meningkatnya Kesejahteraan ASN melalui pemberian perlindungan dan Pelayanan profesi ASN	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Lembaga	1	242,000,000	Kabid. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	NAMA OPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENJA TAHUN 2025		PENANGGUNG JAWAB
					TARGET KINERJA	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(16)
1.9	Meningkatnya kualitas Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN yang terintegrasi	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Dokumen	1	18,150,000	Kabid. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
1.10	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian yang terintegrasi	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	181,500,000	Kabid. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
1.11	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Data Kepegawaian secara realtime dan akurat	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen	1	42,350,000	Kabid. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
1.12	Meningkatnya kualitas Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian secara akurat dan realtime	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Laporan	1	18,150,000	Kabid. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
2	**Meningkatnya Kualitas Promosi dan Mutasi ASN sesuai dengan kualifikasi, kompetensi dan kontribusi terhadap organisasi**	**Mutasi dan Promosi ASN**	**Nilai Aspek Promosi dan Mutasi**	**Poin**	**37.5**	**847,000,000**	**Kabid Mutasi dan Promosi**
2.1	Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah yang sesuai dengan Kebutuhan Organisasi	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	Dokumen	1	121,000,000	Kabid Mutasi dan Promosi
2.2	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN secara tepat waktu	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Laporan	2	302,500,000	Kabid Mutasi dan Promosi

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	NAMA OPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENJA TAHUN 2025		PENANGGUNG JAWAB
					TARGET KINERJA	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(16)
2.3	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Promosi ASN sesuai dengan kaidah merit sistem	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	8	423,500,000	Kabid Mutasi dan Promosi
3	**Meningkatnya kualitas Pengembangan karir sesuai dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karir**	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Nilai Aspek Pengembangan karir**	**Poin**	**100**	**381,150,000**	**Kabid. Pengembangan Aparatur dan UPPK**
	Meningkatnya Kualifikasi Pendidikan ASN		**Indeks Kualifikasi ASN**	**Persen**	**13.40**		
3.1	Meningkatnya kualitas engelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN secara berkala	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Dokumen	1	30,250,000	Kabid. Pengembangan Aparatur
3.2	Meningkatnya Kwalitas Kualifikasi Pendidikan ASN sesuai dengan syarat jabatan	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	Dokumen	1	30,250,000	Kabid. Pengembangan Aparatur
3.3	Meningkatnya kualitas koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat sesuai dengan syarat jabatan	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Dokumen	1	30,250,000	Kabid. Pengembangan Aparatur
3.4	Meningkatnya kualitas Layanan Sertifikasi Jabatan ASN sesuai dengan syarat jabatan	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Sertifikasi Jabatan ASN	Orang	20	30,250,000	Kabid. Pengembangan Aparatur
3.5	Meningkatnya kualitas Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN sesuai dengan syarat jabatan	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Laporan	1	30,250,000	Kabid. Pengembangan Aparatur
3.6	Meningkatnya kualitas Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional sesuai dengan syarat jabatan	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Orang	20	30,250,000	Kabid. Pengembangan Aparatur

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	NAMA OPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENJA TAHUN 2025		PENANGGUNG JAWAB
					TARGET KINERJA	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(16)
3.7	Meningkatnya kualitas Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional sesuai dengan syarat jabatan	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Dokumen	2	30,250,000	Kabid. Pengembangan Aparatur
3.8	Meningkatnya kualitas Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN sesuai dengan syarat jabatan	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Orang	20	30,250,000	Kabid. Pengembangan Aparatur
3.9	Meningkatnya kualitas Hasil Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat Fungsional yang akuntabel	Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat Fungsional	Laporan	1	18,150,000	Kabid. Pengembangan Aparatur
3.10	Meningkatnya kualitas Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN secara berkala	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Laporan	1	18,150,000	Kabid. Pengembangan Aparatur
3.11	Meningkatnya kualitas pembinaan fungsional ASN secara berkala	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	Orang	20	42,350,000	Kabid. Pengembangan Aparatur
3.12	Meningkatnya kualitas Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional secara berkala	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Dokumen	1	30,250,000	Kabid. Pengembangan Aparatur
3.13	Meningkatnya kualitas Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional yang akuntabel	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Laporan	1	30,250,000	Kabid. Pengembangan Aparatur
4	**Meningkatnya predikat kinerja organisasi, produktifitas kinerja individu dan kesejahteraaan ASN berdasarkan capaian kinerja dan kedisiplinan ASN.**	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Nilai Aspek manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan dan Disiplin**	**Poin**	**115**	**405,350,000**	**Kabid. Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan**

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	NAMA OPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENJA TAHUN 2025		PENANGGUNG JAWAB
					TARGET KINERJA	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(16)
	Meningkatnya Kinerja ASN yang Objektif dan Produktif		**Indeks Kinerja ASN**	**Persen**	**25.2**		
	Meningkatkan Disiplin, Integritas dan Netralitas ASN		**Indeks Disiplin ASN**	**Persen**	**4.99**		
4.1	Meningkatnya kualitas Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur sesuai dengan Tujuan dan sasaran Organisasi	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	1	18,150,000	Kabid. Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan
4.2	Meningkatnya kualitas Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur yang Objektif dan akuntabel	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	1	145,200,000	Kabid. Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan
4.3	Meningkatnya kualitas Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur yang objektif dan akuntabel	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Laporan	12	18,150,000	Kabid. Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan
4.4	Meningkatnya kualitas ASN yang Diberikan Penghargaan sesuai dengan Kinerja dan Disiplin	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Orang	200	42,350,000	Kabid. Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan
4.5	Meningkatnya kualitas ASN yang Diberikan Tanda Jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Orang	200	42,350,000	Kabid. Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan
4.6	Meningkatnya kualitas Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Dokumen	1	18,150,000	Kabid. Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan
4.7	Meningkatnya kualitas ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	20	42,350,000	Kabid. Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	NAMA OPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENJA TAHUN 2025		PENANGGUNG JAWAB
					TARGET KINERJA	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(16)
4.8	Meningkatnya kualitas Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN secara objektif dan akuntabel	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	1	30,250,000	Kabid. Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan
4.9	Meningkatnya kualitas Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani sesuai dengan ketentuan	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Dokumen	1	30,250,000	Kabid. Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan
4.10	Meningkatnya kualitas Hasil Evaluasi Disiplin ASN yang realtime dan akuntabel	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	Laporan	2	18,150,000	Kabid. Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan
	UPPK					**1,053,050,000**	
1	**meningkatnya kwalitas pelayanan administrasi umum perangkat daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah**	**Persen**	**100**	**599,300,000**	**Sekretaris**
1.1	meningkatnya kwalitas Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	363,000,000	Sekretaris
1.2	meningkatnya kwalitas Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	36,300,000	Sekretaris
1.3	meningkatnya kwalitas Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	200	200,000,000	Sekretaris
2	**Meningkatnya kualitas Pengembangan karir sesuai dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karir**	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Nilai Aspek Pengembangan karir**	**Poin**	**100**	**453,750,000**	**UPPK**
2.1	Meningkatnya kapasitas Kinerja ASN guna mendukung kinerja organisasi	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	400	30,250,000	Ka. UPPK

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	NAMA OPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENJA TAHUN 2025		PENANGGUNG JAWAB
					TARGET KINERJA	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(16)
2.2	Meningkatnya ketersediaan data Potensi ASN secara lengkap dan akurat	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Dokumen	3	423,500,000	Ka. UPPK

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis BKD Provinsi NTB Tahun Tahun 2024 – 2026 yang menjadi pedoman dalam penyusunan program / kegiatan di lingkungan BKD Provinsi NTB.

Rencana Kerja ini akan menjadi arah dan pedoman dalam penyusunan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menjadi tolak ukur pencapaian Tujuan dan Sasaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2025. Keberhasilan pelaksanaan rencana kerja ini tergantung pada sikap, mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para pelaksana. Dalam kaitan ini diharapkan peran serta seluruh pimpinan, karyawan dan karyawati Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk melaksanakannya.

Dengan adanya Rencana kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 ini diharapkan agar:

1. Semua aparat Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat berkewajiban menjalankan kebijakan yang tertuang dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja ini secara konsisten dan bertanggung jawab dengan memanfaatkan secara tepat dan terarah dengan memaksimalkan semua potensi, sarana dan prasarana yang dimiliki, berdaya guna dan berhasil guna serta berkelanjutan.
2. Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat ini dapat dijadikan sebagai pedoman, acuan dan dasar dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan yang dibuat dan berkewajiban melaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang yang ada.
3. Tujuan dan Sasaran yang telah disepakati dalam Rencana Strategis serta dijabarkan ke dalam rencana kerja tahunan dapat diwujudkan dengan tindakan kinerja yang lebih proaktif, aspiratif, akomodatif dan partisipasif terhadap kebutuhan dan potensi masyarakat, sinergi antar pelaku pembangunan lintas kabupaten/kota, antar wilayah dan kawasan pembangunan melalui

peningkatan kualitas dan kesamaan pola pikir dan pola tindak guna mewujudkan koordinasi dan keterpaduan perencanaan dalam pelaksanaan pembangunan.

Hubungan kerja dan koordinasi antar bidang merupakan kunci keberhasilan dalam melaksanakan rencana kerja ini. Melalui partisipasi, semangat dan komitmen, diharapkan Rencana Kerja ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, melainkan secara substansial merupakan refleksi dari tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan Visi dan Misi daerah yang ingin dicapai.

Semoga Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Profesional dan Melayani.

Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

H. YUSRON HADI, S.T.,MUM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197006111997031007